

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelaborasi, dan mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Melalui penelusuran terhadap sumber-sumber ilmiah, peneliti dapat memahami perkembangan wacana, temuan-temuan utama, serta pendekatan teoritis yang telah digunakan sebelumnya. Selain itu, tinjauan ini juga bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam peta kajian yang lebih luas, termasuk celah atau kekosongan ilmiah (gap) yang ingin diisi. Dengan demikian, pembahasan dalam bagian ini menjadi landasan konseptual yang memperkuat argumen dan arah analisis dalam penelitian secara keseluruhan.

Jurnal ke-1, “Dilema Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara: Ketiadaan Peran ASEAN dalam Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar dalam Perspektif English School” oleh Alvian Rizky H. Jurnal ini membahas fenomena perekrutan tentara anak di Myanmar, yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun isu ini mendapat perhatian luas dari PBB, NGO internasional, dan sejumlah negara tetangga, tetapi ASEAN justru tidak menunjukkan peran aktif, termasuk dua lembaganya: AICHR dan ACWC, padahal ASEAN telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti CRC dan OPAC (Rizky, 2022).

Jurnal ini membahas perekrutan tentara anak di Myanmar dengan menyoroti ketiadaan peran ASEAN, khususnya AICHR dan ACWC, meskipun ASEAN sudah meratifikasi instrumen HAM internasional. Gap spot-nya terletak pada kenyataan bahwa kajian tersebut hanya berfokus pada peran kelembagaan ASEAN, tanpa mengulas secara mendalam peran aktor non-negara (misalnya NGO lokal/regional) atau bagaimana negara-negara anggota ASEAN menafsirkan kewajiban HAM tersebut dalam konteks domestik. Dengan kata lain, masih ada kekosongan analisis

tentang mengapa mekanisme normatif ASEAN tidak berjalan efektif, serta bagaimana aktor lain selain ASEAN dapat mengisi kekosongan perlindungan dalam kasus perekrutan tentara anak.

Jurnal ke-2, Analisis English School terhadap Fenomena Terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)" oleh Muhammad Fachrie. Jurnal ini membahas fenomena munculnya ISIS sebagai ancaman keamanan internasional yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh pendekatan tradisional seperti realisme dan liberalisme. Kedua teori tersebut dianggap gagal menjelaskan akar persoalan kemunculan kelompok teror seperti ISIS. Realisme terlalu fokus pada kekuatan militer dan aktor negara, sementara liberalisme terlalu mengandalkan institusi formal tanpa mempertimbangkan konflik nilai dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat internasional (Fachrie, 2023).

Jurnal tersebut membahas fenomena munculnya ISIS dengan menekankan keterbatasan teori tradisional (realisme dan liberalisme) serta menawarkan English School sebagai alternatif. Namun, gap spot-nya ada pada ruang analisis yang belum banyak dieksplor, yaitu bagaimana English School dapat menjelaskan peran aktor non-negara, norma transnasional, dan solidaritas global dalam menghadapi ancaman terorisme seperti ISIS. Kajian tersebut masih menyoroti kegagalan teori tradisional, tetapi belum cukup mengulas kontribusi konkrit English School dalam merumuskan strategi penanganan, baik melalui pendekatan pluralis maupun solidarist.

Jurnal ke-3, jurnal yang berjudul *"The Papua Conflict: The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities—Review from The English School Theory"* oleh Mohamad Rosyidin, Andi Akhmad Basith Dir, dan Fendy Eko Wahyudi membahas konflik Papua melalui pandangan teori English School dalam studi hubungan internasional. Penulis mengidentifikasi akar perbedaan pandangan antara Indonesia dan komunitas internasional, khususnya negara-negara Pasifik dan organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan pendekatan English School, artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia memosisikan isu Papua sebagai persoalan kedaulatan dan non-intervensi, sejalan dengan pendekatan pluralis, sementara komunitas internasional

membingkai isu ini dalam konteks hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, mencerminkan pendekatan solidaris. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ketegangan dalam forum internasional dan memperkuat posisi masing-masing pihak yang sukar untuk didamaikan, sehingga konflik tetap berlanjut tanpa titik temu (Rosyidin et al., 2022).

Jurnal tersebut sudah mengidentifikasi perbedaan perspektif antara Indonesia (pluralis: kedaulatan dan non-intervensi) dan komunitas internasional (solidaris: HAM dan self-determination) dengan menggunakan kerangka English School. Namun, gap spot-nya terletak pada belum adanya analisis tentang peran aktor non-negara, terutama NGO atau masyarakat sipil, dalam menjembatani dua perspektif yang bertentangan tersebut. Kajian masih berhenti pada level negara vs komunitas internasional, padahal salah satu kekuatan English School adalah melihat kontribusi world society, yaitu individu dan organisasi transnasional dalam membentuk norma dan memediasi konflik.

Jurnal ke-4, jurnal yang berjudul *“The Nightmare of North Korean Refugees: Sebuah Analisis Pendekatan English School dalam Hubungan Internasional”* oleh Naili Afifah membahas pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para pengungsi Korea Utara melalui perspektif teori English School, khususnya pendekatan solidaris. Penulis menjelaskan bahwa para pengungsi menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penolakan perlindungan hukum, baik di negara asal maupun di negara transit seperti China dan Rusia. Dengan menggunakan pendekatan solidaris, artikel ini menekankan pentingnya peran masyarakat internasional baik negara maupun aktor non-negara seperti PBB dan organisasi Liberty in North Korea (LiNK) untuk terlibat aktif dalam melindungi hak-hak pengungsi dan menegakkan norma internasional. Melalui kombinasi nilai moral, hukum internasional, dan kerja sama lintas aktor, tulisan ini menyoroti perlunya solidaritas global untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih adil dan stabil bagi para korban pelanggaran HAM (Afifah, 2020).

Jurnal Naili Afifah sudah menekankan pentingnya pendekatan solidaris dalam English School serta peran negara dan aktor non-negara internasional (seperti PBB dan LiNK) dalam melindungi pengungsi Korea Utara. Namun, gap spot-nya ada

pada ketiadaan analisis mengenai peran aktor lokal atau regional dalam memberikan perlindungan, serta bagaimana norma-norma internasional itu benar-benar diimplementasikan di lapangan. Kajian lebih banyak menekankan level global (solidaritas internasional), tetapi belum mengeksplorasi mekanisme konkret yang bisa menjembatani antara norma internasional dan realitas di negara transit.

Jurnal ke-5, jurnal yang berjudul "*RSPO, ISPO and Global Environmental Governance: An English School Perspective*" oleh Yanyan Mochamad Yani dan Verdinand Robertua. Jurnal ini membahas dinamika tata kelola lingkungan global melalui studi perbandingan dua skema sertifikasi kelapa sawit—RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)—dengan menggunakan perspektif teori English School. Penulis mengkaji bagaimana norma, institusi, dan praktik internasional terbentuk serta dipertahankan oleh aktor negara dan non-negara dalam masyarakat internasional. RSPO diposisikan sebagai bentuk solidarisme global karena melibatkan berbagai aktor internasional seperti NGO dan perusahaan multinasional, sedangkan ISPO mencerminkan pendekatan pluralis yang menekankan pada kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Artikel ini menyoroti ketegangan antara nilai-nilai universal keberlanjutan dengan prinsip non-intervensi dalam sistem internasional, serta bagaimana kedua pendekatan tersebut memengaruhi legitimasi dan efektivitas tata kelola lingkungan (Yani & Robertua, 2017).

Jurnal Yani & Robertua sudah membandingkan RSPO (solidaris) dan ISPO (pluralis) dengan perspektif English School, serta menyoroti ketegangan antara nilai universal (sustainability) dan prinsip kedaulatan. Namun, gap spot-nya ada pada belum dieksplorasinya bagaimana aktor lokal, petani kecil, atau komunitas di lapangan berperan dalam dinamika tata kelola sawit tersebut. Kajian lebih fokus pada level institusi dan aktor besar (negara, NGO internasional, perusahaan multinasional), sehingga masih ada kekosongan dalam memahami dampak konkret sertifikasi terhadap aktor akar rumput serta bagaimana mereka memaknai norma keberlanjutan dalam konteks lokal.

Jurnal ke-6, jurnal yang berjudul "*An Analysis of the World Society Conceptualization in the English School*" oleh Ali Onur. Jurnal ini membahas

bagaimana konsep *world society* dalam teori *English School* digunakan untuk menganalisis peran aktor non-negara dalam hubungan internasional. Penulis menyoroti bahwa, meskipun *English School* dikenal dengan konsep *international society*, dimensi *world society* yang menekankan aturan, institusi, nilai, dan kepentingan bersama yang dibentuk oleh aktor non-negara masih kurang dikembangkan secara analitis. Studi ini mengkritik literatur yang cenderung fokus pada aktor non-negara berbasis nilai kemanusiaan (seperti HAM) dan bersifat global, sambil mengabaikan aktor berbasis kepentingan atau yang berskala regional. Penulis menawarkan pembaruan konsep *world society* agar mencakup fenomena non-global, menghapus kaitan eksklusif dengan modernitas, serta membedakan antara kepentingan dan nilai sebagai dasar terbentuknya *world society*. Dengan revisi ini, konsep tersebut diharapkan mampu menjelaskan peran berbagai aktor non-negara, baik modern maupun historis, dalam mempengaruhi sistem negara dan masyarakat internasional (Onur, 2016).

Jurnal Ali Onur sudah menyoroti kekurangan *English School* dalam mengembangkan dimensi *world society*, khususnya karena literatur terlalu fokus pada aktor non-negara berbasis nilai kemanusiaan berskala global. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya kajian yang mengulas secara empiris bagaimana aktor non-negara berbasis kepentingan (misalnya ekonomi, bisnis, regional, atau bahkan kelompok lokal) turut membentuk norma, institusi, dan praktik dalam masyarakat internasional. Kajian masih bersifat konseptual, sehingga ada celah untuk penelitian yang lebih aplikatif tentang bagaimana konsep *world society* yang diperluas itu bekerja dalam kasus nyata.

Jurnal ke-7, jurnal yang berjudul "*Insurgency, Counterinsurgency and Human Security: A Case Study of Armed Violence in Papua during the COVID-19 Pandemic*" oleh Stefani Selina Prameswari dan Nadia Amani Husna. Jurnal ini membahas dinamika kekerasan bersenjata antara kelompok separatis dan aparat keamanan Indonesia di Papua dengan menggunakan pendekatan *human security*. Penulis menyoroti bahwa pandemi COVID-19 memperburuk kerentanan masyarakat sipil di wilayah seperti Intan Jaya, Mimika, Puncak, dan Nduga, di mana konflik bersenjata menimbulkan gangguan terhadap keamanan pribadi, akses layanan kesehatan, dan stabilitas ekonomi lokal. Dengan menekankan dimensi

keamanan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan, artikel ini mengkritisi pendekatan negara yang masih berfokus pada *state-centric security*, tanpa mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat sipil. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran pendekatan kebijakan keamanan dari dominasi militeristik menuju prioritas terhadap perlindungan dan pemberdayaan warga sipil di tengah konflik dan krisis kesehatan (Prameswari & Husna, 2022).

Jurnal Prameswari & Husna sudah menekankan pentingnya human security dalam melihat konflik Papua pada masa pandemi COVID-19, serta mengkritik pendekatan negara yang masih state-centric dan militeristik. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya analisis lebih lanjut mengenai mekanisme implementasi kebijakan human security itu sendiri, misalnya bagaimana strategi lokal, aktor non-negara (LSM, gereja, komunitas adat), atau kerja sama internasional dapat mengisi kekosongan perlindungan yang tidak dijalankan oleh negara. Kajian juga masih terbatas pada masa pandemi, sehingga celah penelitian lain bisa diarahkan pada ketahanan jangka panjang masyarakat sipil di Papua di luar konteks COVID-19.

Jurnal ke-8, jurnal yang berjudul “*Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia*” membahas perlindungan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia dengan menggunakan pendekatan *personal human security*. Penulis menyoroti berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh para pekerja migran, seperti kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi, serta ketidakpastian hukum yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Kajian ini juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2017, mampu memberikan jaminan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran. Dengan mengedepankan perspektif human security, artikel ini menekankan pentingnya perlindungan negara yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan keselamatan individu secara menyeluruh (Faudzan et al., 2019).

Jurnal Faudzan et al., sudah membahas perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia dengan perspektif personal human security, serta mengevaluasi efektivitas UU No. 18 Tahun 2017. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya

analisis mendalam tentang implementasi nyata kebijakan tersebut di lapangan, terutama bagaimana perlindungan itu dijalankan oleh aktor pelaksana (KBRI/KJRI, pemerintah daerah, agen penyalur, hingga komunitas migran sendiri). Kajian juga masih terbatas pada aspek regulatif dan normatif, sehingga ada celah untuk penelitian yang menyoroti praktik perlindungan konkret serta sejauh mana pekerja migran benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang ada.

Jurnal ke-9, jurnal yang berjudul “Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia–Malaysia” oleh Yohanes Sanak. Jurnal ini membahas pentingnya pendekatan *human security* dalam mengelola wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di Kalimantan. Jurnal ini mengkritik pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada keamanan negara (*state security*) melalui kekuatan militer, karena dianggap tidak efektif menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan seperti ketimpangan ekonomi, minimnya infrastruktur, dan lunturnya nasionalisme warga. Studi kasus menunjukkan bahwa permasalahan utama justru berasal dari lemahnya perlindungan terhadap keamanan individu dalam bentuk rendahnya kesejahteraan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penulis mendorong pergeseran strategi keamanan ke arah penguatan *human security* sebagai pendekatan yang lebih humanis dan solutif, yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat ikatan antara negara dan rakyatnya di kawasan perbatasan (Sanak, 2012).

Jurnal Yohanes Sanak sudah menekankan pentingnya pergeseran dari *state security* ke *human security* dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia, terutama di Kalimantan. Namun, gap spot-nya ada pada belum adanya analisis lebih dalam mengenai mekanisme implementasi strategi *human security* itu sendiri, misalnya peran pemerintah daerah, kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, maupun keterlibatan masyarakat lokal dalam mewujudkan keamanan manusia di kawasan perbatasan. Kajian ini masih lebih bersifat normatif-konseptual, sehingga belum menjawab bagaimana pendekatan *human security* dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan lintas sektor di daerah perbatasan.

Jurnal ke-10, jurnal ini berjudul “Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis: Studi Kasus Peranan *ASEAN Political Security Community* (APSC) dalam Pemberantasan Human Trafficking” oleh Lilis Apriliani & Rahmat Hidayat. Jurnal ini membahas peran *ASEAN’s Political Security Community* (APSC) dalam memberantas perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, khususnya dengan pendekatan human security dan studi keamanan kritis. Penulis menyoroti bahwa meskipun APSC dibentuk untuk meningkatkan solidaritas dan keamanan regional, implementasinya dalam menangani perdagangan manusia masih lemah dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan keamanan manusia yang berpusat pada individu, serta pentingnya emansipasi dan perlindungan dari kekerasan struktural dan langsung. Studi ini juga mengkritik lemahnya kerja sama multilateral antar negara ASEAN, kendala struktural dan politik internal, serta kurangnya penegakan hukum dan fasilitas perlindungan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa APSC masih sebatas gagasan normatif yang belum mampu mewujudkan transformasi nyata dalam pencegahan perdagangan manusia, sehingga diperlukan penguatan tata kelola keamanan regional yang lebih inklusif dan berperspektif human security (Apriliani & Rahmat, 2023).

Jurnal Apriliani & Rahmat sudah menyoroti kelemahan APSC dalam memberantas perdagangan manusia dengan perspektif human security dan critical security studies. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya kajian mendalam tentang mekanisme alternatif di luar APSC yang bisa memperkuat perlindungan korban, misalnya peran aktor non-negara, jaringan masyarakat sipil, maupun kerja sama bilateral/sub-regional yang sering kali lebih responsif dibanding forum ASEAN. Selain itu, penelitian ini masih berfokus pada level normatif dan kelembagaan, sementara analisis praktik implementasi nyata di negara anggota (misalnya Indonesia, Thailand, Kamboja) belum banyak dieksplor.

Jurnal ke-11, jurnal yang berjudul “*Rohingya’s in Search for Security: An Introduction to Human Security Concept through Rohingya’s Lens*” oleh Riana Mardila. Jurnal ini membahas krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar melalui lensa *Human Security*. Penulis mengkaji bagaimana ketidakamanan manusia (*human insecurity*) yang dialami oleh Rohingya seperti

kehilangan kewarganegaraan, diskriminasi sistematis, dan penolakan suaka oleh negara-negara tetangga yang merupakan bentuk nyata dari kegagalan negara dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar *Human Security*: bebas dari rasa takut, bebas dari kekurangan, dan hidup dengan martabat. Studi ini menyoroti bahwa meskipun konsep *Human Security* telah lama diakui dalam wacana internasional, penerapannya dalam kebijakan nyata masih sangat terbatas. Melalui studi kasus Rohingya, artikel ini menunjukkan bagaimana *Human Security* belum mampu menjadi kerangka operasional yang kuat dalam merespons krisis, serta menyerukan peran lebih besar dari aktor-aktor non-negara, termasuk individu, NGO, dan akademisi, untuk mengisi kekosongan tersebut (Mardila, 2020).

Jurnal Riana Mardila sudah mengkaji krisis Rohingya melalui lensa *Human Security*, dengan menyoroti kegagalan negara dalam menjamin hak dasar (kewarganegaraan, perlindungan, martabat) dan keterbatasan penerapan konsep ini dalam kebijakan nyata. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya analisis empiris yang lebih rinci tentang bagaimana aktor non-negara (NGO, organisasi regional, komunitas transnasional, atau diaspora Rohingya sendiri) dapat mengoperasionalkan *Human Security* di lapangan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara. Kajian masih berhenti pada level seruan normatif, belum menguraikan mekanisme praktis untuk mentransformasikan *Human Security* menjadi kerangka kerja operasional yang efektif dalam merespons krisis Rohingya.

Jurnal ke-12, jurnal ini berjudul "*Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security*" oleh Ali Maksu. Jurnal ini membahas bagaimana para pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke tanah air (post-migrant workers) menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial yang kompleks, yang belum banyak diperhatikan oleh kebijakan negara. Meskipun mereka dijuluki sebagai "pahlawan devisa," kenyataannya mereka kerap kembali dalam kondisi yang tidak produktif, minim pendidikan, kesulitan finansial, dan tinggal di wilayah padat penduduk dengan kompetisi tinggi. Menggunakan perspektif *human security*, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan berkelanjutan yang berpusat pada manusia melampaui pendekatan negara-sentris dalam teori hubungan internasional konvensional seperti realisme dan liberalisme. Penulis berargumen bahwa pendekatan *human security* mampu memberi kerangka

yang lebih komprehensif dalam menjawab kerentanan para pekerja migran pasca-kepulangan, serta menekankan perlunya kebijakan afirmatif dan integratif dari pemerintah Indonesia (Maksum, 2021).

Jurnal Ali Maksum sudah menyoroti kerentanan post-migrant workers Indonesia dengan perspektif human security, terutama pada dimensi sosial-ekonomi dan kurangnya perhatian negara setelah kepulangan. Namun, gap spot-nya adalah belum adanya kajian yang membahas mekanisme implementasi kebijakan berkelanjutan secara konkret untuk melindungi pekerja migran pasca-kepulangan, misalnya melalui program reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan/keterampilan, dan peran komunitas lokal. Kajian masih dominan normatif-teoretis, sehingga celah penelitian ada pada bagaimana konsep human security dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan reintegrasi dan pemberdayaan post-migrant workers.

Dari ke-12 literatur tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian memiliki keterkaitan dengan topik yang saya angkat dalam skripsi ini, khususnya dalam hal pendekatan yang digunakan dan isu-isu kemanusiaan yang dibahas. Meskipun fokus kajiannya beragam mulai dari konflik, pengungsi, hingga perlindungan pekerja migran semuanya memiliki benang merah yang serupa, yaitu melihat hubungan internasional dari perspektif yang lebih kritis dan berpihak pada individu atau kelompok rentan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa persamaan antara penelitian ini dengan jurnal-jurnal yang sudah dianalisis, baik dari pendekatan teori, objek kajian, maupun aktor yang berperan.

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan mendasar dengan 12 jurnal yang telah ditinjau. Dari segi pendekatan, baik penelitian ini maupun jurnal-jurnal tersebut sama-sama menggunakan perspektif di luar teori hubungan internasional tradisional. Penelitian ini memadukan pendekatan *Human Security* dan teori *English School*, yang juga terlihat dalam jurnal ke-1 hingga ke-6 yang menggunakan *English School* untuk menganalisis isu-isu seperti konflik, terorisme, dan kerja sama regional. Sementara itu, jurnal ke-7 hingga ke-12 menggunakan pendekatan *Human Security* untuk membahas isu-isu seperti kekerasan terhadap

masyarakat sipil di Papua, perlindungan pekerja migran, dan krisis pengungsi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik penelitian ini maupun jurnal-jurnal tersebut menekankan pentingnya kerangka analisis yang lebih kritis dalam memahami dinamika hubungan internasional.

Selain itu, penelitian ini dan sebagian besar jurnal tersebut juga sama-sama menaruh perhatian pada perlindungan terhadap kelompok rentan dan peran aktor non-negara. Penelitian ini mengkaji peran NGO Migrant CARE dalam melindungi buruh migran Indonesia ilegal di Malaysia, serupa dengan jurnal ke-4 yang menyoroti peran NGO LiNK dalam isu pengungsi Korea Utara, serta jurnal ke-5, ke-10, dan ke-11 yang juga membahas kontribusi aktor non-negara dalam berbagai krisis. Fokus terhadap isu kemanusiaan seperti yang dibahas dalam jurnal ke-8, ke-11, dan ke-12 juga memperkuat keterkaitan dengan penelitian ini, karena sama-sama melihat migrasi dan ketidakamanan sebagai bagian dari problem struktural dalam sistem internasional yang membutuhkan respons di luar pendekatan negara-sentris.

Dari semua jurnal yang sudah penulis analisis, memang banyak yang membahas soal perlindungan kelompok rentan, peran aktor non-negara, dan pendekatan human security. Tapi, belum ada yang secara khusus membahas tentang peran NGO lokal dalam melindungi buruh migran Indonesia yang berstatus ilegal, terutama yang bekerja di Kamboja. Kebanyakan jurnal fokusnya masih umum, seperti isu pengungsi, konflik, atau migrasi secara luas, dan biasanya melibatkan organisasi internasional, bukan NGO lokal dari Indonesia.

Penelitian ini menawarkan pembaruan (*novelty*) dibandingkan dengan 12 literatur sebelumnya karena secara khusus mengkaji peran Migrant Care sebagai organisasi non-pemerintah dalam melindungi buruh migran Indonesia ilegal di Kamboja. Berbeda dengan literatur sebelumnya yang umumnya berfokus pada aktor negara atau organisasi internasional, penelitian ini menyoroti kontribusi organisasi non-pemerintah dengan pendekatan gabungan antara *Human Security* dan teori *English School*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, baik dari sisi perlindungan individu sebagai subjek keamanan, maupun dari sisi norma dan interaksi dalam masyarakat internasional.